



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia yang selanjutnya disebut sebagai " Para Pihak " ;

Mengacu pada Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Kerja Sama Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia di abad ke-21, ditandatangani di Moskow pada tanggal 21 April 2003;

Mempertimbangkan bahwa perkembangan hubungan antara Para Pihak berkontribusi terhadap saling pengertian dan kepercayaan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia;

Menyadari aturan yang ada antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia dalam berbagai bidang pertahanan dan kerja sama terkait militer;

Menegaskan pentingnya dialog tentang isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas internasional dan regional serta saling pengertian kebijakan pertahanan kedua negara;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada antara kedua belah Pihak melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, menghormati secara penuh kedaulatan dan integritas teritorial dan non-intervensi dalam urusan internal;

Bertujuan memperkuat koneksitas antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia;

Mencatat bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan berkontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua belah Pihak;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dari kedua belah Pihak;

Dengan ini telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk mendirikan kerangka kerja untuk kerja sama di bidang pertahanan antara para Pihak, sesuai dengan prinsip yang diakui secara universal dan norma-norma hukum internasional dan traktat internasional di mana Federasi Rusia dan Republik Indonesia berpartisipasi, termasuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:

1. Mendirikan dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama; seperti aspek politik-militer, saling membangun kepercayaan, masalah keamanan internasional, dan kontra-terorisme;
2. Bertukar informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama; seperti kegiatan penciptaan perdamaian dan operasi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah Pihak melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan pendidikan dan kegiatan terkait lainnya;
4. Mengembangkan hubungan dan kerja sama antara Angkatan Bersenjata kedua belah Pihak sebagaimana disepakati bersama;
5. Berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional Para Pihak dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, serta pengembangan proyek yang disepakati bersama;
 - b. Industri pertahanan, diantaranya transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.

6. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

PASAL 3

PENGATURAN PELAKSANAAN

1. Dengan memperhatikan ruang lingkup kerja sama berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini Para Pihak dapat melaksanakan bentuk-bentuk kerja sama sebagai berikut:
 - kunjungan resmi delegasi di berbagai tingkat;
 - partisipasi dalam latihan militer atas undangan atau partisipasi sebagai pengamat;
 - kunjungan kerja pakar kemiliteran;
 - partisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti kursus teori dan praktik, seminar dan konferensi atas undangan dari Para Pihak;
 - pendidikan dan pelatihan dari personil pertahanan dan militer;
 - panggilan sandar untuk kapal perang dan kunjungan penerbangan militer;
 - kunjungan para ahli dalam pelaksanaan kegiatan bersama di lingkungan militer;
 - pelaksanaan acara budaya dan olahraga bersama;
 - bentuk lain dari kegiatan kerja sama pertahanan dengan persetujuan bersama Para Pihak.
2. Untuk tujuan pelaksanaan bentuk-bentuk kerja sama tersebut pengaturan tertulis yang terpisah harus dibuat oleh Para Pihak.

PASAL 4

OTORITAS YANG BERWEWENANG

1. Otoritas yang berwenang yang dipercayakan dalam pelaksanaan Persetujuan ini adalah:
 - a. Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
 - b. Untuk pihak Rusia: Kementerian Pertahanan Federasi Rusia;
2. Apabila dianggap perlu, dapat dibentuk kelompok kerja berdasarkan Persetujuan ini, oleh otoritas yang berwenang dari Kedua Belah Pihak.
3. Apabila salah satu Pihak mengubah Otoritas Pelaksana yang ditunjuk, perubahan tersebut harus diinformasikan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
4. Dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Persetujuan ini, Otoritas yang berwenang akan mengadakan pertemuan reguler atau setiap saat apabila diperlukan.

PASAL 5

PENGATURAN KEUANGAN

1. Setiap Pihak akan menanggung biaya sendiri terkait dengan keikutsertaannya dalam Persetujuan ini, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.
2. Pengaturan keuangan dapat dibuat terpisah oleh Para Pihak untuk kegiatan tertentu.
3. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetujuan, bergantung pada ketersediaan dana dari Para Pihak.

PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak mengakui bahwa selama pelaksanaan Persetujuan ini mungkin ada karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik Negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak termasuk traktat internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Federasi Rusia berpartisipasi, Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual.
3. Tataran pendistribusian dari hak sebagai hasil kegiatan intelektual yang diciptakan dalam pelaksanaan Persetujuan ini, perlindungan hukum dan penggunaannya harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh dalam Rangka Kerjasama Bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1 Desember 2006, dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak.
4. Perlindungan dan penggunaan kekayaan intelektual yang diperoleh, digunakan dan/atau dialihkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh dalam Rangka Kerjasama Bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1

Desember 2006, dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak.

5. Setiap hasil kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual yang timbul dari penelitian bersama atau kegiatan bersama dalam pelaksanaan Persetujuan ini dapat dimiliki bersama dan dilepaskan secara kasus per kasus melalui pengaturan tertulis yang terpisah.

PASAL 7

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Setiap informasi yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan Persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan, dibuka atau disiarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik orang maupun badan hukum, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak asal.
2. Informasi yang diperoleh oleh satu Pihak dalam kerangka kerjasama tidak boleh digunakan untuk efek yang merugikan Pihak lain.
3. Para Pihak harus menentukan sendiri batas-batas untuk distribusi informasi yang dialihkan berdasarkan Persetujuan ini atau yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Penandaan yang diterapkan pada pembawa data dari informasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Di Federasi Rusia - << Для служебного пользования >> ("For official use")
 - Di Republik Indonesia - << Hanya Untuk Keperluan Kedinasan>> ("For official use").

4. Pihak yang telah memperoleh informasi tersebut harus menjamin penggunaan dan perlindungannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional masing-masing Pihak terkait dengan penanganannya.
5. Para Pihak harus saling memberi tahu sebelumnya tentang keharusan menjaga kerahasiaan fakta kerja sama atau data lain yang terkait dengan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini. Keharusan tersebut harus diatur dalam pengaturan tertulis tambahan antara Para Pihak.
6. Tataran pertukaran, persyaratan dan langkah-langkah perlindungan informasi rahasia dari Para Pihak selama pelaksanaan dan setelah pengakhiran Persetujuan ini harus ditentukan dalam peraturan terpisah.

PASAL 8

BANTUAN MEDIS DARURAT

1. Apabila diperlukan, Pihak Penerima harus memberikan bantuan medis darurat kepada perwakilan dari Pihak pengirim dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini.
2. Bantuan medis harus diberikan dalam fasilitas medis militer atau sipil di Pihak Penerima.
3. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, Pihak pengirim harus menanggung biaya bantuan medis dimaksud.

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan persetujuan ini harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi bersama Para Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.

PASAL 10 AMANDEMEN

Dengan persetujuan tertulis dari para pihak, perubahan dapat dibuat terhadap Persetujuan ini. Perubahan tersebut mulai berlaku sesuai dengan Pasal 11 dari Persetujuan ini.

PASAL 11 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang oleh Para Pihak.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi pengaturan tertulis yang dibuat oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.

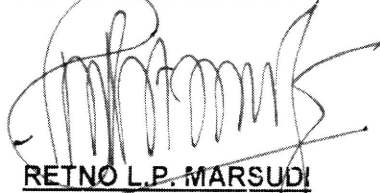
4. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan Pasal 7 Persetujuan ini kecuali disetujui lain oleh kedua belah Pihak.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan traktat internasional lainnya dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia berpartisipasi.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Sochi pada hari 18 bulan Mei tahun 2016. dalam dua rangkap, dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama.

Dalam hal adanya perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**



RETNO L.P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA,**



LAVROV SERGEY VIKTOROVICH
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обороны

Правительство Республики Индонезии и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Декларацией об основах дружественных и партнерских отношений между Республикой Индонезией и Российской Федерацией в XXI веке, подписанной в г. Москве 21 апреля 2003 г.,

признавая, что развитие отношений между Сторонами способствует углублению взаимопонимания и доверия между Республикой Индонезией и Российской Федерацией,

признавая существующие договоренности между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации в различных областях обороны и военного сотрудничества,

подтверждая важность диалога по вопросам поддержания международной и региональной безопасности, стабильности и взаимопонимания в области оборонной политики государств Сторон,

имея намерения активизировать и укрепить существующие двусторонние отношения между двумя Сторонами посредством совместной деятельности в области обороны, основанной на принципах равенства, взаимной выгоды, полном уважении суверенитета

и территориальной целостности государств, а также невмешательстве во внутренние дела,

имея целью дальнейшее укрепление связей между Вооруженными Силами Республики Индонезии и Вооруженными Силами Российской Федерации,

отмечая, что укрепление оборонного сотрудничества будет дополнять взаимовыгодные отношения между оборонными ведомствами обеих Сторон,

в соответствии с существующим законодательством государств Сторон,

настоящим согласились о нижеследующем:

Статья 1

Цель

Целью настоящего Соглашения является установление основы для сотрудничества в области обороны между Сторонами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, участниками которых являются Республика Индонезия и Российская Федерация, а также в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 2

Направления сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

1. регулярные двусторонние встречи и консультации по вопросам безопасности, затрагивающим общие интересы: по военно-политическим аспектам, вопросам укрепления взаимного доверия, вопросам международной безопасности и контртеррористической деятельности;

2. обмен информацией и опытом по вопросам, затрагивающим общие интересы, таким как миротворческая деятельность и операции по поддержанию мира под эгидой Организации Объединенных Наций;
3. содействие повышению профессионализма личного состава вооруженных сил и оборонных ведомств государств Сторон посредством образовательных программ, тренировок, обмена визитами, обеспечении учебным оборудованием, и другой связанной с этим деятельности;
4. развитие отношений и взаимодействие между вооруженными силами по взаимному согласию сторон;
5. участие в развитии сотрудничества в соответствии с национальным законодательством Сторон в следующих областях:
 - а. научно-техническое сотрудничество в области обороны посредством обмена сотрудниками, визитов, тренировок, обмена информацией, а также посредством развития совместных проектов по взаимному согласию Сторон;
 - б. оборонная промышленность, включая передачу технологий, совместные исследования, совместное производство и совместную торговлю;
6. другие направления сотрудничества по взаимному согласию Сторон.

Статья 3

Формы сотрудничества

1. Учитывая направления сотрудничества, указанные в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
 - официальные визиты делегаций различного уровня Сторон;
 - участие по приглашению Сторон в военных учениях или присутствие на них в качестве наблюдателей;
 - рабочие встречи военных экспертов;

- участие в обучающих курсах, семинарах, конференциях по приглашению другой Стороны;
- обучение и подготовка военных кадров;
- заходы военных кораблей и визиты военной авиации по приглашению Сторон;
- командирование специалистов для реализации совместных мероприятий в военной области;
- проведение совместных культурных и спортивных мероприятий;
- другие формы сотрудничества в области обороны по взаимному согласию Сторон.

2. По отдельным направлениям сотрудничества, указанным в статье 2 настоящего Соглашения, Сторонами могут быть достигнуты письменные договоренности.

Статья 4

Уполномоченные органы

1. Уполномоченными органами Сторон по выполнению настоящего Соглашения являются:
 - a. от Индонезийской Стороны – Министерство обороны Республики Индонезии;
 - b. от Российской Стороны – Министерство обороны Российской Федерации.
2. При необходимости уполномоченные органы Сторон могут создавать рабочие группы в рамках настоящего Соглашения.
3. В случае изменения уполномоченных органов Стороны информируют об этом изменении по дипломатическим каналам.
4. Для выполнения статьи 2 и статьи 3 настоящего Соглашения уполномоченные органы проводят встречи на регулярной основе.

Статья 5

Финансирование

1. Каждая из Сторон возмещает расходы, связанные со своим участием в настоящем Соглашении, если нет договоренности между Сторонами об ином.
2. Отдельные финансовые договоренности могут быть заключены между Сторонами по отдельным мероприятиям.
3. Реализация мероприятий в рамках настоящего Соглашения зависит от наличия финансирования Сторон.

Статья 6

Права на интеллектуальную собственность

1. Стороны признают, что в ходе реализации настоящего Соглашения могут создаваться, использоваться и/или передаваться результаты интеллектуальной деятельности и/или интеллектуальная собственность, принадлежащая государствам Сторон и/или их физическим и/или юридическим лицам.
2. В соответствии с национальным законодательством Сторон, а также с другими международными договорами, участниками которых являются Республика Индонезия и Российская Федерация, Стороны примут необходимые меры для обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и/или защиты интеллектуальной собственности.
3. Порядок распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе реализации настоящего Соглашения, их правовая охрана и использование определяются Соглашением между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты

интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, подписанным в г. Москве 1 декабря 2006 г., и в случае необходимости Стороны по согласию могут заключать отдельные письменные договоренности.

4. Порядок защиты и использования интеллектуальной собственности, полученной, используемой и/или передаваемой в ходе реализации настоящего Соглашения, определяются Соглашением между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, подписанным в г. Москве 1 декабря 2006 г., и в случае необходимости Стороны по согласию могут заключать отдельные письменные договоренности.
5. Любые результаты интеллектуальной собственности, полученные от совместных исследований или совместной деятельности в рамках реализации настоящего Соглашения, могут находиться в совместном владении и распоряжении в зависимости от случая, что является предметом отдельных письменных договоренностей между Сторонами.

Статья 7

Неразглашение информации

1. Любая информация, получаемая или передаваемая в рамках настоящего Соглашения, будет использоваться исключительно в целях настоящего Соглашения и не будет передаваться, разглашаться, распространяться напрямую или опосредованно на временной или постоянной основе третьим сторонам, лицам или организациям без предварительного письменного согласия создавшей ее Стороны.
2. Информация, полученная одной из Сторон в рамках сотрудничества, не должна использоваться в ущерб другой Стороне.

3. Стороны самостоятельно устанавливают ограничения по распространению информации, передаваемой в соответствии с настоящим Соглашением или являющейся результатом его выполнения. На носителях такой информации проставляется пометка:
 - в Республике Индонезии – «Hanya Untuk Keperluan Dinas» («For official use only»);
 - в Российской Федерации – «Для служебного пользования» («For official use only»).
4. Сторона, получившая такую информацию, обеспечивает ее защиту и обращение с ней в соответствии с национальным законодательством каждой из Сторон, связанным с обращением с ней.
5. Необходимость сохранения в тайне факта сотрудничества в военной области между Сторонами или других сведений о сотрудничестве заблаговременно доводится Сторонами друг до друга. Подобная необходимость будет определяться дополнительным соглашением между Сторонами.
6. Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну Сторон, в ходе реализации и по окончании срока действия настоящего Соглашения определяются отдельным соглашением.

Статья 8

Неотложная медицинская помощь

1. В случае необходимости, принимающая Сторона оказывает неотложную медицинскую помощь представителям направляющей Стороны, участвующим в мероприятиях, проводимых в рамках настоящего Соглашения.
2. Такая медицинская помощь оказывается в военных или гражданских медицинских учреждениях государств Сторон.

3. Расходы на такое медицинское обслуживание несет направляющая Сторона, если нет договоренности об ином.

Статья 9

Урегулирование споров

Любые спорные вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения относительно его толкования или применения, разрешаются Сторонами путем консультаций, переговоров и/или по дипломатическим каналам.

Статья 10

Внесение изменений

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения по взаимному письменному согласию Сторон. Такие изменения вступают в силу в соответствии со статьей 11 настоящего Соглашения.

Статья 11

Вступление в силу и прекращение действия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
2. Настоящее Соглашение действует в течение 5 (пяти) лет и автоматически продлевается на соответствующие пятилетние периоды. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты.
3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет дальнейшего выполнения незавершенных письменных договоренностей (контрактов), заключенных в соответствии с

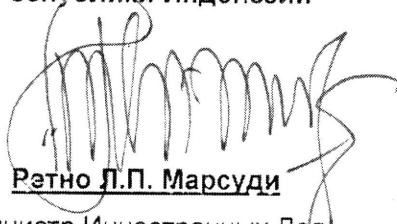
настоящим Соглашением в период его действия, если Стороны не договорятся об ином.

4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, обязательства Сторон, предусмотренные статьей 7 настоящего Соглашения, остаются в силе, если Стороны не договорились об ином.
5. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, участниками которых являются Республика Индонезия и Российская Федерация.

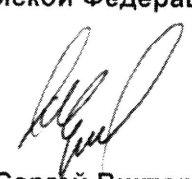
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в Сочи 18 мая 2016 года в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий для целей толкования настоящего Соглашения будет использоваться текст на английском языке.

**За Правительство
Республики Индонезии**


Ретно Л.П. Марсуди
Министр Иностранных Дел

**За Правительство
Российской Федерации**


Лавров Сергей Викторович
Министр Иностранных Дел



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as the "Parties";

Referring to the Declaration on the Framework of Friendly and Partnership Relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st Century, signed in Moscow on 21 April 2003;

Considering that the development of relations between the Parties contributes to mutual understanding and confidence between the Republic of Indonesia and the Russian Federation;

Recognizing the existing arrangements between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on various fields of defence and military-related cooperation;

Confirming the importance of a dialogue on issues related to international and regional security and stability as well as mutual understanding of both countries' defence policies;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two Parties through cooperative activities in the field of defence based on the principles of equality, mutual benefit, full respect of sovereignty and territorial integrity and non-interference in internal affairs;

Having a purpose of strengthening connections between the Armed Forces of the Republic of Indonesia and the Armed Forces of the Russian Federation;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both Parties national defences;

In accordance with the existing national legislation of both Parties;

Hereby **agreed** as follows:

ARTICLE 1

PURPOSE

The purpose of this Agreement is to establish a framework for cooperation in the field of defence between the Parties, in accordance with universally recognized principles and norms of international law and international treaties which participants are the Republic of Indonesia and the Russian Federation as well as in accordance with the national legislation of the Parties.

ARTICLE 2

SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

1. Establishing regular bilateral dialogues and consultations on security issues of common concern; such as on political-military aspects, mutual confidence-building, international security issues, and counter-terrorism.

2. Exchanging information and experiences on issues of common concerns; such as in peace-building activities and peacekeeping operations under the auspices of the United Nations Organizations.
3. Promoting human resources development of defence institutions and armed forces of both Parties through education, training, exchange of visits, provisions of educational equipment and other related activities.
4. Developing relations and cooperation between the Armed Forces of both Parties as mutually agreed upon.
5. Participating in the development of cooperation in accordance with the national legislation of the Parties in the following areas:
 - a. Science and technology on the field of defence through exchange of personnel, visits, trainings, and exchange of information, as well as developing mutually agreed joint projects;
 - b. Defence industry, which includes transfer of technology, joint research, joint production and joint marketing.
6. Other areas of cooperation as mutually agreed.

ARTICLE 3

IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. With due regard to the scope of cooperation under Article 2 of this Agreement the Parties may conduct the following forms of cooperation, such as through:
 - official visits of the delegations at various levels;
 - participation in military exercises on invitation of the Parties or participation in them as observers;
 - working visits of military experts;
 - participation in activities such as theoretic and practical courses, seminars and conferences upon invitation of the Parties;

- education and training of defence and military personnel;
 - port calls of warships and visits of military aviation;
 - visits of specialists for implementation of common activities in military sphere;
 - conduct of joint cultural and sports events;
 - other forms of defence cooperation activities by mutual consent of the Parties.
2. For the purpose of implementation of these forms of cooperation separate written arrangements shall be concluded between the Parties.

ARTICLE 4

COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:
 - a. For the Russian side: the Ministry of Defence of the Russian Federation;
 - b. For the Indonesian side: the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
2. As deemed necessary, working groups may be established under this Agreement, by the competent authorities of both Parties.
3. Where either Party changes its designated Implementing Authorities, it shall inform the other Party of such change through diplomatic channels.
4. In order to review the implementation of Article 2 and Article 3 of this Agreement, the Competent Authorities shall hold regular meetings or at any time deemed necessary.

ARTICLE 5

FINANCIAL ARRANGEMENT

1. Each Party will bear its own costs associated with its participation in this Agreement, unless agreed otherwise by the Parties.
2. Separate financial arrangements may be concluded between the Parties for specific activities.
3. Carrying out of activities under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

ARTICLE 6

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties recognize that during the implementation of this Agreement there may be a creation, use and/or transfer of results of intellectual activity and/or intellectual property belonging to the Parties' States and/or their natural or juridical persons.
2. In accordance with the national legislation of the Parties as well as with other international treaties where the Republic of Indonesia and the Russian Federation are participants, the Parties shall take necessary measures to assure legal protection of results of intellectual activity and/or protection of intellectual property.
3. The order of distributions of rights for the results of intellectual activity created in course of implementation of this Agreement, their legal protection and use, shall be arranged in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on mutual protection of rights to the results of intellectual activity applied and obtained in the course of bilateral military-technical cooperation signed in Moscow on 1 December 2006, and when necessary Parties may conclude separate written arrangements upon agreement between the Parties.

4. The protection and use of intellectual property obtained, used and/or transferred in course of implementation of this Agreement, shall be arranged in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on mutual protection of rights to the results of intellectual activity applied and obtained in the course of bilateral military-technical cooperation signed in Moscow on 1 December 2006, and when necessary Parties may conclude separate written arrangements upon agreement between the Parties.
5. Any results of intellectual activity and/or intellectual property arising out of joint research or joint activity under the implementation of this Agreement may be jointly owned and disposed on case by case basis through a separate written arrangement.

ARTICLE 7

NON-DISCLOSURE OF INFORMATION

1. Any information exchanged under the framework of this Agreement shall be used exclusively for the purpose of this Agreement and shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons or entities, without the prior written consent of the originating Party.
2. The information obtained by a Party within the framework of cooperation shall not be used to the detrimental effect of the other Party.
3. The Parties shall determine themselves the limits to distributions of the information transferred pursuant to this Agreement or resulting from its implementation. Marking applied to data carrier of such information shall be as follows:
 - in the Russian Federation - «Для служебного пользования» ("For official use only")

- in the Republic of Indonesia - «Hanya Untuk Keperluan Kedinasan» ("For official use only").

4. The Party that has obtained such information shall ensure its use and protection in accordance with each Party's national legislation and regulations related to its handling.
5. The Parties shall inform each other in advance on the necessity to keep secret of the fact of cooperation or other data related to cooperation under this Agreement. Such necessity shall be specified in additional written arrangement between the Parties.
6. The order of exchange, the terms and protection measures of classified information of the Parties during the implementation and after the termination of this Agreement shall be determined by a separate Agreement.

ARTICLE 8

EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE

1. If necessary, the host Party shall provide emergency medical assistance to the representatives of the sending Party in the course of cooperation activities under the present Agreement.
2. Such medical assistance shall be rendered in military or civilian medical facilities of the host Party.
3. Unless otherwise agreed by the Parties, the sending Party shall cover the expenses of such medical assistance.

ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes between the Parties arising on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through mutual consultation or negotiation of the Parties and/or through diplomatic channels.

ARTICLE 10 AMENDMENTS

By mutual written consent of the Parties, amendment can be made to the present Agreement. The amendment shall come into force in accordance with Article 11 of the present Agreement.

ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

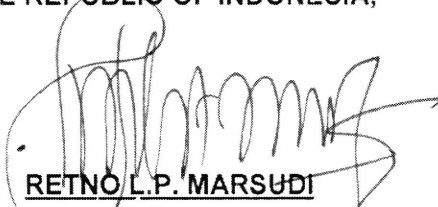
1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification of the fulfillment of necessary internal state procedures by the Parties.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.
3. Termination of the present Agreement shall not affect the written arrangements commenced by the Parties under this Agreement unless otherwise agreed by the Parties.
4. Termination of this Agreement shall not affect the validity of the provisions of Article 7 of the present Agreement unless otherwise agreed by both Parties.
5. The provisions of the present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties under other international treaties in which the Republic

of Indonesia and the Russian Federation are participants.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Sochi on this 18 day of May in the year 2016 in duplicate copies, in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall be used.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,**



RETNO L.P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION,**



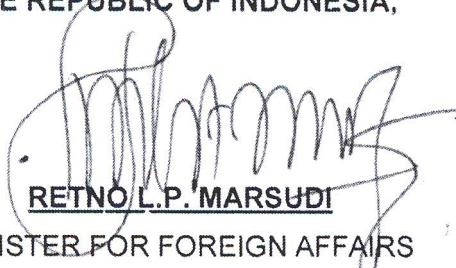
LAVROV SERGEY VIKTOROVICH
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

of Indonesia and the Russian Federation are participants.

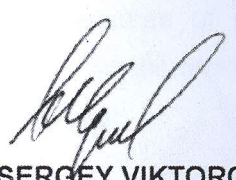
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Sochi on this 18 day of May in the year 2016 in duplicate copies, in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall be used.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

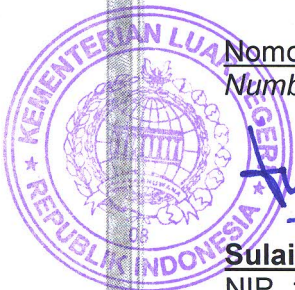

RETNO L.P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION,**


LAVROV SERGEY VIKTOROVICH
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0251/CTC/10/2018/52
Number




Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 10 Oktober 2018
Date

